

**ANALISIS KOMITMEN ORGANISASI, KESIAPAN SUMBERDAYA
MANUSIA, INFRASTRUKTUR SERTA SISTEM INFORMASI DALAM
MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS
AKRUAL
(Studi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti)**

Tengku Azman¹

¹Program Studi Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Riau

Abstract The purpose of this study was to determine the readiness of the Government of Kepulauan Meranti indicated with commitment, human resources, facilities and information systems; to know the constraints in the implementation of Government Regulation No. 71 of 2010 concerning the Government Accounting Standards (SAP) and to determine the acceleration of the implementation of the strategic model of PP No. 71 of 2010 on Government Accounting Standards (SAP). Type of research is descriptive qualitative research. The research was conducted by taking object in Kepulauan Meranti Regional Government. The type of data used in this study is primary data and secondary data. Methods of data analysis using descriptive analysis. Based on the previous data analysis Kepulauan Meranti government readiness is indicated by the commitment, human resources, facilities and information systems can be concluded that the district government integrity is seen from the parameter set categories and human resources for preparedness, readiness and information systems infrastructure is a category quite ready . Constraints in the implementation of Government Regulation No. 71 of 2010 concerning the Government Accounting Standards (SAP), among others, to date preparation LKPD still done manually no special software, the number of HR executive in quantity is not enough, lack Bimtek or training, lack of socialization, existing facilities and infrastructure, but still not sufficient. Acceleration of the implementation of the strategic model of PP. 71 of 2010 on Government Accounting Standards (SAP), among others Accrual-Based SAP Development according to the needs, preparation of Accrual-Based SAP Technical Bulletins as needed, Human Resource Development in the Field of Government Accounting.

Keywords: readiness, commitment, human resources, facilities, information systems

PENDAHULUAN

Perkembangan reformasi sektor publik yang begitu dinamis saat ini tidak dapat dilepaskan dari tuntutan masyarakat yang melihat secara kritis buruknya kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Perubahan suatu sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi

yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik (Asmadewa, 2006). Agenda-agenda reformasi terhadap tuntutan perubahan organisasional kemudian menciptakan sejumlah prinsip atau doktrin tata kelola pemerintahan seperti terangkum dalam konsep new public management atau prinsip reinventing government.

Good governance atau pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Good governance ini erat kaitannya dengan New Public Management (NPM) yang sedang berkembang pesat dewasa ini. New Public Management merupakan sistem manajemen administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan di hampir seluruh negara maju. New Public Management merupakan fenomena global, yang mempunyai tujuan memperbaiki efisiensi dan efektivitas, meningkatkan responsivitas, dan memperbaiki akuntabilitas manajerial organisasi publik (Bambang Sancoko dkk, 2008).

Upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya. Transparansi yang merupakan salah satu tujuan MDGs diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah dalam bentuk pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi (pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan) dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, keluarnya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akruwal mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari *dual basis* menjadi akruwal penuh. Sesuai

keepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasi penuhnya di tahun 2015.

Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Menurut Simanjuntak (2010) salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah komitmen dari organisasi/instansi dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri. Simanjuntak (2010) juga menyatakan bahwa dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan.

Aldiani (2010) berpendapat ketersediaan perangkat pendukung yang akan membantu SKPD dalam melaksanakan tugas seperti tersedianya *computer* dan *software* yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan SAP. Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi. Kebutuhan akan perangkat keras seperti jaringan internet, intranet atau pun Lokal Area Network (LAN) akan sangat membantu. Ketidaktersediaan infrastruktur ini, tentu akan menjadi batu sandungan tersendiri.

Indah (2008) telah melaksanakan penelitian tentang "Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukungnya Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada Pemerintahan Kota Medan". Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukungnya mempunyai pengaruh yang

positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Riau yang pada akhirnya akan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2014 ini telah mulai mempersiapkan diri untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dengan melakukan berbagai persiapan-persiapan.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Penelitian ini penting dilakukan karena konsep akuntansi akrual di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih sangat baru. Walaupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan berbagai persiapan dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 yang akan datang, namun perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi sampai sejauh mana persiapan-persiapan yang telah dilakukan tersebut dapat diimplementasikan secara baik pada tahun 2015.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang diindikasikan dengan komitmen organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur serta sistem informasi dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 serta untuk mengetahui model strategis akselerasi implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran atas tingkat kesiapan dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 serta dapat mempersiapkan diri lebih lanjut dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan akan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai

kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Menurut Fakhurrazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

Manfaat-manfaat penerapan basis akrual menurut H Thompson dalam Bambang Widjajoso (2008), akan mencakup hal-hal seperti:

- a. Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.
- b. Menunjukkan bagaimana aktifitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya.
- c. Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban pemerintah.
- d. Meningkatkan daya pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah.
- e. Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya.

Komponen Laporan Keuangan dalam PP No. 71 tahun 2010

Komponen Laporan Keuangan Pokok:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan yang bersifat optional:

1. Laporan Kinerja Keuangan (LKK)
2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Komponen Laporan Keuangan Pokok :

- A. Laporan Anggaran
 - 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- B. Laporan Finansial
 - 1. Neraca
 - 2. Laporan Operasional (LO)
 - 3. Laporan Arus Kas (LAK)
 - 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- C. Catatan atas Laporan Keuangan

Komitmen Organisasi

Buchanan dalam Vandenberg (1992) mendefinisikan komitmen adalah sebagai penerimaan karyawan atas nilai-nilai organisasi (identification), keterlibatan secara psikologis (psychological immersion), dan loyalitas (affection attachment). Komitmen merupakan sebuah sikap dan perilaku yang saling mendorong (reinforce) antara satu dengan yang lain. Selanjutnya Allen & Meyer (dalam Dunham, dkk 1994) membedakan komitmen organisasi atas tiga komponen, yaitu:

- 1. Komitmen afektif (Affective Commitment), melibatkan rasa memiliki dan terlibat didalam organisasi.
- 2. Komitmen kontinuans (Continuance Commitment), dimensi komitmen ini atas dasar besar kecilnya pembiayaan yang akan ditanggung oleh karyawan jika meninggalkan organisasi. Tentu saja dalam hal ini erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan resiko yang akan diambalnya. Jadi yang menentukan komitmen adalah faktor rasional.
- 3. Komitmen normatif (Normative Commitment), komitmen ini lebih menekankan kepada keterlibatan perasaan dan menggambarkan dedikasi seseorang untuk tetap tinggal dan bekerja pada organisasinya.

Sumber Daya Manusia

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam

melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005).

Infrastruktur

Dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akruaI peran teknologi informasi merupakan salah satu factor yang cukup menentukan. Menurut Turban, Rainer, & Potter (2007), "Information technology infrastructure is the physical facilities, IT components, IT services, and IT personnel that support the entire organization." Infrastruktur teknologi informasi pada sebuah organisasi terdiri dari sebuah perangkat fisik berupa IT components, IT services, dan IT management yang mendukung keseluruhan organisasi. IT components terdiri dari computer hardware, software, dan teknologi komunikasi yang digunakan oleh personel teknologi informasi untuk menghasilkan IT services. IT services meliputi manajemen data.

Menurut O'Brien (2007), hardware mencakup semua peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Hardware berkaitan dengan peralatan keras dengan media komunikasi yang menghubungkan beberapa jaringan dan memproses paket data sehingga transmisi data lebih efektif.

Sistem Informasi

Calliueot dan Lapayre (dalam Handayani, 2007) menyatakan bahwa penciptaan suatu informasi yang efektif membutuhkan suatu pengorganisasian untuk mengembangkan sejumlah sistem-sistem pendukung. Penarikan staf yang kompeten dan layak adalah suatu tindakan yang sangat penting. Investasi yang besar dalam perangkat keras, perangkat lunak dan pendukung sistem yang lain adalah sesuatu yang penting, namun

tanpa manusia bersumber daya yang kompeten untuk mengkoordinasikan sistem akan menghasilkan informasi yang tidak layak, tidak tepat waktu atau tidak akurat. Sumber informasi adalah data dimana data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal data item. Kualitas suatu informasi tergantung dari beberapa hal yaitu (Mukhtar, 2002):

- a. Akurat
- b. Tepat waktu
- c. Relevan
- d. Lengkap
- e. Dapat dimengerti

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif (descriptive research), yakni penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian deskriptif adalah penelitian survei. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview agar nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi.

Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, yang berada di Provinsi Riau. Kabupaten ini merupakan kabupaten terbaru di Propinsi Riau serta telah mendapatkan prediket WTP atas laporan keuangan tahun 2012 dan 2013.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan yang ada pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 169 orang. Mengingat jumlah, jarak dan waktu yang tidak begitu sulit, maka seluruh populasi, penulis jadikan sampel penelitian. Penelitian yang menggunakan seluruh anggota populasinya disebut sampel total atau sensus.

Variabel penelitian diukur dengan komitmen, sumber daya manusia, infrastruktur, sistem informasi. yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Komitmen organisasi, Komitmen organisasi ini dengan diukur dengan indikator : Penerimaan atas tujuan nilai-nilai organisasi. rasa memiliki terhadap organisasi, keterlibatan dalam organisasi secara utuh. loyalitas

terhadap tujuan organisasi. profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi beban tugas dan tanggung jawabnya, memperhitungkan benefit yang diperoleh.

- b. Sumber daya manusia Variabel sumber daya manusia diukur dengan 10 item indikator yakni : SDM yang dimiliki berkualifikasi dengan jumlah yang cukup, sekurang-kurangnya 25 % staf berpendidikan lulusan D3 atau S1 Akuntansi, SDM yang ada telah memiliki uraian tugas yang jelas, peran dan tanggung jawab SDM yang ada telah ditetapkan dengan jelas dalam peraturan daerah, uraian tugas telah sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya, Terdapat pedoman dan prosedur dan proses akuntansi, SDM yang ada telah melaksanakan proses akuntansi, terdapat SDM pendukung operasional yang memadai, pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian telah dilakukan, dana-dana telah dianggarkan untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan.
- c. Infrastruktur, Infrastruktur diukur dengan sarana maupun sarana yang dimiliki dalam kelancaran penerapan SAP berbasis akruak. Infrastruktur ini diukur dengan indikator : ketersediaan computer yang cukup untuk melaksanakan tugas, jaringan internet yang telah terpasang pada unit kerja, jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan, proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi, adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur, peralatan yang rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.
- d. Sistem informasi, sistem informasi ini diukur dengan indikator : sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, mampu beradaptasi dengan pengguna, mampu menyediakan data yang akurat, mampu menyediakan data yang saling terkait, adanya pelatihan untuk peningkatan kualitas pengguna, adanya pendampingan dalam operasional sistem informasi

HASIL PENELITIAN

Dari keempat variabel yang dilakukan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Semua SKPD berkomitmen melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah untuk mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan basis akrual pada tahun 2015.
- b. Dari variabel sumberdaya manusia, terlihat bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, secara umum sumber daya manusia yang ada dapat dikatakan cukup siap untuk melaksanakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kendala yang utama ditemukan adalah secara teknis proses akuntansi belum dilakukan secara benar, input data atau transaksi ke system informasi (SIPKD) belum dilakukan sesuai prosedur akuntansi, pencatatan kas keluar belum dilakukan pada terjadinya transaksi, pencatatan penerimaan pendapatan belum dibukukan sebagaimana mestinya. Pencatatan asset belum dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga penambahan dan perpindahan asset tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. Pencatatan persediaan juga belum dilakukan sesuai dengan proses atau prosedur akuntansi, penambahan dan pengurangan persediaan tidak dapat diketahui sewaktu-waktu.
- c. Aspek infrastruktur, implementasi standar akuntansi berbasis akrual tahun 2015, belum siap. Jaringan internet yang merupakan salah satu factor penentu keberhasilan penerapan belum tersedia pada hampir semua SKPD. Jaringan internet untuk menjalankan SIPKD baru dapat dilakukan pada kantor DPPKAD, sehingga dalam prakteknya bendahara pengeluaran harus datang ke DPPKAD Kab. Kepulauan Meranti untuk melakukan input transaksi pengeluaran. Dan ini tentunya menjadi permasalahan, apalagi ketika proses input ini dilakukan secara serentak oleh bendahara pengeluaran, jaringan yang ada tidak mampu bekerja dengan baik.
- d. Sistem informasi yang ada dapat dikatakan belum siap untuk mendukung penerapan system akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sistem yang digunakan adalah SIPKD yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penggunaan system informasi ini agak berbeda dengan system informasi yang digunakan sebelumnya, sehingga user dalam hal ini bendahara sedikit kesulitan dalam penggunaannya sehari-hari. Sistem informasi ini juga belum mampu mengakomodir serta mengintegrasikan sistem informasi pendapatan daerah dan sistem informasi pengelolaan barang milik daerah sehingga transaksi-transaksi yang terjadi belum terjadi

sinkronisasi. Sehingga perlu dilakukan konsolidasi secara manual. Ini tentunya membutuhkan waktu sehingga data yang dibutuhkan sewaktu-waktu tidak bias ditampilkan. Sistem yang ada belum mampu menampilkan data secara akura

Model strategis akselerasi implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan antara lain :

- a. Menyusun dan menetapkan system dan prosedur serta kebijakan akuntansi berbasis akrual dengan Peraturan Kepala Daerrah.
- b. Pengembangan SDM melalui Sosialisasi/*Workshop* SAP Berbasis Akrua dan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi seluruh pejabat yang mempunyai kewenangan dalam penyusunan laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
- c. Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan serta beberapa saran bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain :

1. Perlu komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh sumberdaya yang ada untuk melaksanakan atau mengimplementasikan SAP basis akrual sehingga implementasi SAP basis akrual yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku disamping itu peningkatan kompetensi sumber daya manusia perlu ditingkatkan.
2. Perlu diambil langkah-langkah yang tepat dan strategis dalam upaya mengimplementasikan SAP basis akrual antara lain :
 - a. Pembangunan infrastruktur berupa jaringan internet yang dapat menjangkau seluruh SKPD dan kecamatan perlu segera dilakukan.
 - b. Perlu dilakukan alih teknologi baik dari hardware maupun software, sehingga ketika terjadi kerusakan dapat langsung diperbaiki oleh sumberdaya manusia yang ada di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Solikin, 2006, Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol.2 No.2 Nopember 2006.
- Bambang Sancoko, 2008, *Kajian terhadap Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Jakarta, Erlangga.
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2002. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pusat Litbang Pembangunan Dan Keuangan Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. 2010. *Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Penuh Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010*. Jakarta
- Saleh, Z & Pendlebury M.W. 2002. *Accruals Accounting in Government*.
- Simanjuntak, Binsar. tanpa tahun. *Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*.
<http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art.7pdf>, [November 2012].
- Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*
- Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*.
- Widjajarso, Bambang, 2008. *Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan*.